

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI**

*AN ANALYSIS ON FACTORS AFFECTING
HOTEL TAX REVENUE IN KENDARI CITY*

ARNITA DEWI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Magister Keuangan Daerah**

Disusun dan diajukan oleh

ARNITA DEWI

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI

Disusun dan diajukan oleh

ARNITA DEWI

Nomor Pokok P2600205523

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 24 february 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisis Penasihat,

Prof. Dr. H. A. Karim Saleh
Ketua

Ketua Program
Magister Keuangan Daerah

Drs. A. Kahar Akil, MS
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, MA

Prof. Dr. dr.A. Razak Thaha, M.Sc

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat,rahmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat Akademik guna memperoleh Gelar Magister pada program Study Magister Keuangan Daerah (MKD) Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr.H.A. Karim Saleh selaku pembimbing I dan Bapak Drs. A. Kahar Akil, MS selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pikiran dan meluangkan waktu serta dengan kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaannya membimbing penulis dalam pembuatan tesis ini.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimah kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs.H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si selaku Walikota Kendari dan Bapak Amarullah Doko, SE, M.Si selaku Kepala Dispenda Kota Kendari yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini.

2. Seluruh teman-teman staf Dispenda Kota Kendari, atas segala doa, bantuan, serta dukungannya selama penulis melaksanakan pendidikan ini.
3. Seluruh staf dosen Magister Keuangan Daerah yang dengan semangat pengabdian telah mentransferkan ilmu pengetahuan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Kedua orang tua yang kukasihi, Drs. Aburaerah Tosepu serta Hj. Roslian Banawula, saudara-saudaraku yang tercinta, serta Zulkarnaen Abdullah yang selama penulis melaksanakan pendidikan ini selalu memberikan doa, bantuan dan dukungannya.
5. Seluruh teman-teman seangkatan tahun 2005
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua.

Akhirnya disadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, segala kritikan dan saran yang positif konstruktif akan disambut dengan senang hati demi penyempurnaan tulisan ini.

Makassar, februari 2007

Penulis,

Arnita Dewi

ABSTRAK

ARNITA DEWI. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari* (dibimbing oleh H.A. Karim Saleh dan A. Kahar Akil).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB sektor hotel, jumlah pengunjung/wisatawan, dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Kendari

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kuantitatif dengan program SPSS.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PDRB sektor hotel, jumlah pengunjung/wisatawan, dan jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Kendari. Variabel jumlah hotel (X_3) memiliki elastisitas paling tinggi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Kendari dibandingkan dengan variabel PDRB sektor hotel (X_1) dan jumlah pengunjung/wisatawan (X_2).

ABSTRACT

ARNITA DEWI. An analysis on Factors Affecting Hotel Tax Revenue in Kendari City (supervised by H. A. Karim Saleh and A. Kahar. Akil)

This research aimed to analyze the influence of gross regional domestic product of hotel sector, the number of visitors / tourists, the number of hotel on hotel tax revenue in Kendari City.

The data in this research were obtain through observation and documentation. They were then analyzed descriptively using SPSS method.

The results show that, the variables of gross regional domestic product of hotel sector, the number of visitors / tourist, the number of hotel simultaneously have a significant influence on hotel tax revenue in Kendari City. The number of hotel (X3) has the highest elasticity on hotel tax revenue in Kendari City compared to the variables of gross regional domestic product of hotel sector (X1) and the number of visitors / tourists (X2).

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	I
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
Bab. I . Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
Bab . II. Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Penerimaan Pemerintah	10
C. Pajak Daerah	13
D. Retribusi Daerah	17
E. Pajak Hotel	19
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel	21
G. Kerangka Pemikiran	25
H. Hipotesis	28

Bab . III. Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber data	30
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Metode Analisis	31
E. Definisi Operasional Variabel	36

Bab. IV. Gambaran Umum dan Hasil Penelitian.

A. Deskripsi Daerah Penelitian	37
B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	46
C. Keadaan Perhotelan	47
D. Perkembangan Pajak Hotel	49
E. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kendari	51
F. Perkembangan PDRB Sektor Hotel	52
G. Perkembangan Jumlah Pengunjung/ wisatawan	54
H. Perkembangan Jumlah Hotel	55
I. Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel	56

Bab. V. Kesimpulan dan Saran.

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman.
1.	Realisasi PAD dan kontribusinya terhadap APBD Kota Kendari	3
2.	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari	5
3.	Luas Wilayah Kota Kendari	39
4.	Penduduk Kota Kendari menurut jenis kelamin	40
5.	Jenis Lapangan Usaha penduduk Kota Kendari	41
6.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Kendari	47
7.	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kendari	49
8.	Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari	50
9.	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kendari	51
10.	Perkembangan PDRB Sektor Hotel di Kota Kendari	53
11.	Perkembangan Jumlah Pengunjung/ Wisatawan di Kota Kendari	55
12.	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kendari	56
13.	Perkembangan PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.	57
14.	Hasil analisis Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari	58
15.	Analisis Varians pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, Jumlah Hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel	61

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
1.	Skema Kerangka Pikir Penelitian	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran.1. Perkembangan Pajak Hotel, PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ wisatawan, dan Jumlah Hotel di Kota Kendari Tahun 1996-2005.
- Lampiran 2. Logaritma Natural (ln) Pajak Hotel, PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel di Kota Kendari Tahun 1996-2005.
- Lampiran 3. Hasil Analisis Regresi Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Pajak Hotel di Kota Kendari.
- Lampiran 6. Uji Heteroskedastisitasn Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Pajak Hotel di Kota Kendari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah di bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Untuk menjalankan fungsi pemerintah, faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.(Kaho, 1997)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa

sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri, yang terdiri dari (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi ; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan-pembangunan di daerah. Karena semakin banyak kebutuhan daerah dapat di biayai dengan Pendapatan Asli Daerah , maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah,juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987).

Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah di era otonomi, maka sangat diperlukan usaha-usaha dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sendiri yaitu dengan upaya peningkatan penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan potensi ekonomi daerah

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut..Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam

merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada Prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. (Insukindro dkk, 1994)

Kontribusi PAD terhadap APBD kota kendari selama sembilan tahun terakhir yaitu periode tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat sebagaimana pada tabel :

Tabel 1. Realisasi PAD dan kontribusi PAD terhadap APBD Kota Kendari T.A 1996/1997 S/D 2004

No	Tahun Anggaran	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)
1	1996/1997	2,157,836,141	19,912,541,914	11,09
2	1997/1998	3,167,789,187	26,596,202,529	11.91
3	1998/1999	3,750,097,129	35,266,794,977	10.63
4	1999/2000	4,105,364,185	42,964,643,168	9.56
5	2000	4,123,033,539	47,405,271,962	8.70
6	2001	8,759,542,302	100,069,038,001	8.79
7	2002	12,261,041,394	140,788,089,413	8.71
8	2003	13,789,839,100	192,632,257,452	7.16
9	2004	14,112,540,263	197,966,870,534	7.13
Rata-rata				9,30

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kendari 2005

Tabel 1 memperlihatkan bahwa besarnya PAD pada periode 1996/1997-2004 terus meningkat , namun presentase kontribusinya terhadap

APBD cenderung menurun dengan rata-rata 9.30 persen pertahun. Penurunan tersebut menunjukkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran secara relatif di banding dengan sumber dana lainnya terus menurun.

Fakta tersebut memacu Pemerintah Kota Kendari tarus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Peningkatan PAD diupayakan melalui memaksimalkan semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan Pajak Hotel.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Kendari yang cukup potensial adalah Pajak Hotel yang objeknya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di Kota Kendari sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara, merupakan sentral aktivitas baik pemerintahan dan pembangunan maupun bisnis dan perdagangan sehingga memiliki daya serap yang tinggi dalam pengembangan usaha perhotelan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak hotel. Selain itu Kota Kendari juga merupakan daerah tujuan sekaligus kota transit bagi wisatawan yang akan berkunjung ke

Sulawesi Tenggara, yang tentunya merupakan potensi pengembangan terhadap jasa perhotelan di Kota Kendari.

Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kendari selama sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari T.A 1996/1997 – 2005

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan realisasi (%)
1	1996/1997	16,000,000	19,904,871	
2	1997/1998	22,000,000	32,937,828	65.48
3	1998/1999	30,000,000	33,821,133	2.68
4	1999/2000	49,000,000	49,291,130	45.74
5	2000	64,000,000	57,983,007	17.63
6	2001	73,000,000	79,300,674	36.77
7	2002	95,000,000	103,109,417	30.02
8	2003	100,000,000	104,903,702	1.74
9	2004	100,000,000	123,452,600	17.68
10	2005	179,000,000	202,057,450	63.67

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kendari 2005

Secara umum gambaran realisasi penerimaan Pajak Hotel mulai Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2005,

pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel Menunjukkan Trend yang pluktuatif. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan realisasi pajak hotel mengalami peningkatan yang signifikan terjadi pada Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebesar 65,48 % sedangkan pada tahun Anggaran1998/1999 mengalami penurunan sebesar 2,68 %, kemudian pada Tahun 1999/2000 kembali terjadi kenaikan sebesar 45,74 %,kemudian pada tahun 2003 turun menjadi 1,74 %, selanjutnya Tahun 2004 dan 2005 kembali terjadi kenaikan sebesar 17,68 % dan 63,67 %.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini sangat penting artinya, karena dapat dijasikan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan selanjutnya . Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Seberapa besar pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/wisatawan, serta Jumlah Hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.

C. Tujuan Penelitian

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

Besarnya pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/wisatawan, serta Jumlah Hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kota Kendari dalam rangka perumusan dan pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak Hotel.
- b. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat ilmiah dalam rangka menambah wawasan sehubungan dengan peranan Pajak hotel dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hendranto (2002) dengan penelitiannya berjudul : “ Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan restoran di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan”.

Hasil Penelitian ini antara lain adalah pertumbuhan penduduk perkotaan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel dan restoran dilihat dari keeretan korelasi yang dihasilkan (koefisien korelasi r) sebesar 0.975 disusul oleh jumlah pengunjung (r) sebesar 0.994 dan PDRB (r) sebesar 0.938.

Hamid (2004) dengan penelitiannya berjudul : “ Analisis Efisiensi dan Efektifitas serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penrimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Samarinda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dalam upaya pengumpulan pajak hotel dan restoran lingkup kota Samarinda sangat efisien. Variabel pendapatan perkapita, PDRB sektor hotel dan restoran, jumlah pengunjung hotel, dan frekwensi even promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota

Samarinda. Adapun variabel yang dominan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Samarinda adalah variabel PDRB Sektor hotel dan restoran dengan nilai *Standardized Coefficients* sebesar 0.768.

Sidik (2002) mengatakan bahwa :

“ Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat”.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pemberian otonomi adalah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka titik berat otonomi

diletakkan di daerah kabupaten dan daerah kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.

B. Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah diartikan sebagai penerimaan dalam arti yang luas yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Sumber-sumber penerimaan pemerintah menurut (Suparmoko ,2000) dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pajak.

Yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat di tunjuk

b. Retribusi.

Yang dimaksud dengan retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

- c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara .

Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan (harga) barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara.

- d. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah

- e. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

Seperti pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi), tol atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu.

- f. Pencetakan Uang Kertas.

Karena fungsi dan sifatnya maka pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang atau meminta kepada bank Sentral guna memberi pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa ada agunan.

- g. Hasil dari Undian Negara.

Dengan undian Negara pemerintah akan mendapatkan dana yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dijual dengan semua pengeluaran-pengeluaran termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian Negara tersebut.

- h. Pinjaman

Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

i. Hadiah.

Sumber dana dan jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberi hadiah kepada pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- ? Hasil pajak daerah
- ? Hasil retribusi daerah
- ? Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- ? Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :

- Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam.

- Dana alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Pinjaman Daerah.

Pemerintah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam dan luar negeri melalui persetujuan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya.

d. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai sumber penerimaan pemerintah daerah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi sumber terbesar bagi pemerintah daerah adalah alokasi dari pemerintah pusat, dengan demikian peran pemerintah pusat masih sangat besar dalam mewujudkan otonomi daerah, sebab penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain belum mampu menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. Pajak Daerah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang umumnya dilaksanakan oleh setiap Negara yang menerapkan kebijaksanaan Desentralisasi (Otonomi Daerah) dan biasanya ruang lingkup pajak ini ditentukan oleh pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat sejauh mana penerapan kebijaksanaan desentralisasi yang dianut, pada Negara yang menganut kebijaksanaan desentralisasi yang tinggi cenderung akan memberikan sumber-sumber pendapatn yang cukup tinggi kepada daerahnya.

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal (1) ayat (6) bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dave (1998) berpendapat bahwa :

"Pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional yang dalam otonomi daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah".

Menurut Kunarjo (1996) yang dimaksud dengan :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah”.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang dapat dilakukan oleh daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung diberikan dan digunakan untuk membiayai kegiatan umum yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah daerah.

Dalam pungutannya, ruang lingkup pajak daerah kabupaten/ kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan jalan (PPJ)
- e. Pajak Parkir
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Hiburan

- **Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dan berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak.

1. **Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)**, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. **Fungsi Mengatur (*Reguler*)**, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan dibidang sosial dan ekonomi , sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

? **Perbedaan Pajak Negara dan Pajak Daerah.**

Pajak Negara adalah merupakan pajak sumber pemasukan dana yang pengelolaannya masuk ke pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan Negara. Pajak Daerah adalah merupakan pajak yang pungutannya dilakukan oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang terdiri dari pajak dan Retribusi daerah.

Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat

2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak boleh terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya Administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sistim perpajakan pusat menurut peraturan peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

D. Retribusi Daerah.

Kaho (1991) menjelaskan bahwa :

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkementingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, kepentingan orang pribadi atau hukum.

Dari pengertian retribusi diatas maka dapat dirumuskan ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah

Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan dan langsung dapat ditunjuk. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan daerah.

b. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka jenis-jenis retribusi daerah terbagi atas 3 (tiga) pengelompokan retribusi meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya-biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

E. Pajak Hotel

Menurut pendapat Mugodim (1999) :

“Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk menginap/istirahat ,memperoleh pelayanan,dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran “

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel merupakan salah satu dari komponen pajak daerah,yakni yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 tahun 2005 tentang pajak hotel ,yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Hotel yang dimaksud adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran meliputi :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubug pariwisata (*Cottage*), motel, wisma pariwisata,pesanggrahan

(hotel) losmen dan rumah penginapan;

2. Pelayanan penunjang antara lain : Restoran, Telepon, faximil, telex ,fotocopy, pelayanan binatu, setrika,taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel;
3. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain : pusat kebugaran (fitnes center) kolam renang, tennis lapangan, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel;
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak hotel adalah :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
2. Asrama dan pondok pesantren
3. fasailitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
4. Pertokoan,perkantoran,perbankan,salon, yang dipakai oleh umum dihotel;
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Adapun subyek pajak hotel sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 pasal 3 tahun 2005 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Dasar pengenaan

pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dengan tarif paling tinggi 10% dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Hotel

Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 : penjelasan pasal 28 ayat (2) : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah.

Berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB dapat membawa dampak pada kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal ini kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan pula meningkatkan penerimaan PAD.

Alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDRB dalam menilai pertumbuhan ekonomi adalah :

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah atau negara. Hal ini berarti

peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

2. PDRB dihitung atas dasar konsep aliran artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauhmana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi sektor perhotelan dapat digambarkan oleh besarnya PDRB sektor perhotelan. Prospek perhotelan akan memberikan bagaimana gambaran tingkat hunian yang tinggi dalam suatu daerah.

Besarnya PDRB sektor ini secara otomatis menggambarkan besarnya pungutan pajak yang diterima oleh pemerintah melalui pajak daerah khususnya pajak hotel.

b. Jumlah Pengunjung/ Wisatawan

Mengingat Kota Kendari tidak memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, maka Kota Kendari harus memperkuat potensi dalam bidang jasa

dan pelayanan serta jasa pendukung lainnya berupa penyediaan hotel yang representatif agar para wisatawan dan para industriawan yang membuka pabrik diluar kota dapat berkantor di Kota Kendari sesuai potensi jasa perkotaan yang lebih memadai dibandingkan daerah sekitar

Pengunjung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Menurut Muqodim (1999) :

“pengunjung merupakan subyek pajak yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran”

Pengembangan perkotaan dalam bidang pelayanan dan jasa serta sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata baik di daerah sendiri maupun daerah sekitar, maka Kota Kendari harus menyediakan jasa pendukung berupa penyediaan hotel dan sarana lainnya untuk memberikan pelayanan bagi pengunjung /wisatawan yang melakukan kunjungan di Kota Kendari dan daerah sekitarnya.

Keterkaitan yang erat antara sektor hotel dengan pengunjung/ wisatawan baik asing maupun domestik membuat perkembangan produksi perhotelan sangat dipengaruhi oleh para pengunjung/wisatawan yang datang di Kota Kendari dan indikator yang paling tepat untuk memperkirakannya adalah lamanya pengunjung/ wisatawan menginap selama berkunjung di Kota Kendari.

Perkembangan dunia pariwisata berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Perbaikan indikator-indikator makro ekonomi dunia merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Proyeksi kunjungan wisatawan juga memperhatikan daya dukung pariwisata yang dapat di sediakan oleh Pemda dan masyarakat sekitarnya. Daya dukung didefinisikan sebagai jumlah manusia yang dapat memanfaatkan wilayah pariwisata khususnya tanpa menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan pada lingkungan fisik, sosial masyarakat, ekonomi serta budaya dari kawasan, serta tanpa adanya penurunan kualitas akibat kehadiran pengunjung.

c. Jumlah Hotel

Sarana penunjang lainnya dalam kegiatan ekonomi kepariwisataan maupun kegiatan sosial lainnya adalah tersedianya fasilitas pemondokan yaitu hotel dan losmen yang cukup baik. Yang dimaksud fasilitas disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang (melati), serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap.

Pertambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh kelahiran dan

pendatang akan menambah penerimaan oleh karena bertambahnya orang yang menginap.

Devas (1989) bahwa :

“Pajak Hotel sangat cocok diperkotaan, karena masyarakatnya mempunyai mobilitas yang cukup tinggi dan obyek pajak jelas tempatnya”.

Perkembangan fasilitas akomodasi hotel dalam suatu wilayah, secara tidak langsung akan menggairahkan dan menunjang aktifitas ekonomi secara luas. Ketersediaan fasilitas akomodasi hotel yang semakin memadai akan mendorong aktivitas sektor perdagangan, sektor angkutan,kepariwisataan serta berbagai sektor ekonomi lain.

Dengan demikian peningkatan prospek perakomodasian ini tetap harus terus dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas sejalan dengan promosi kepariwisataan yang terus digalakkan dalam rangka meningkatkan aktivitas perhotelan sebagai sumber devisa daerah.

G. Kerangka Pikir.

Salah satu argumentasi strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota, sedapat mungkin memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai sejumlah hak dan kewenangan desentralisasi yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat.

Kapasitas dan kemampuan keuangan pemerintah sangat menentukan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, maupun dalam kapasitas sebagai administrator pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam memenuhi tuntutan tersebut pemerintah kabupaten dan kota mau tidak mau harus berupaya memaksimalkan potensi-potensi penerimaan yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan atas tuntutan tersebut pemerintah Kota Kendari sebagai salah satu daerah otonom, berupaya memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kota Kendari antara lain adalah PDRB sektor hotel yang menggambarkan tingkat pendapatan regional sektor tersebut yang secara otomatis akan menggambarkan hubungannya dengan pungutan pajak yang akan diterima oleh pemerintah Kota Kendari.

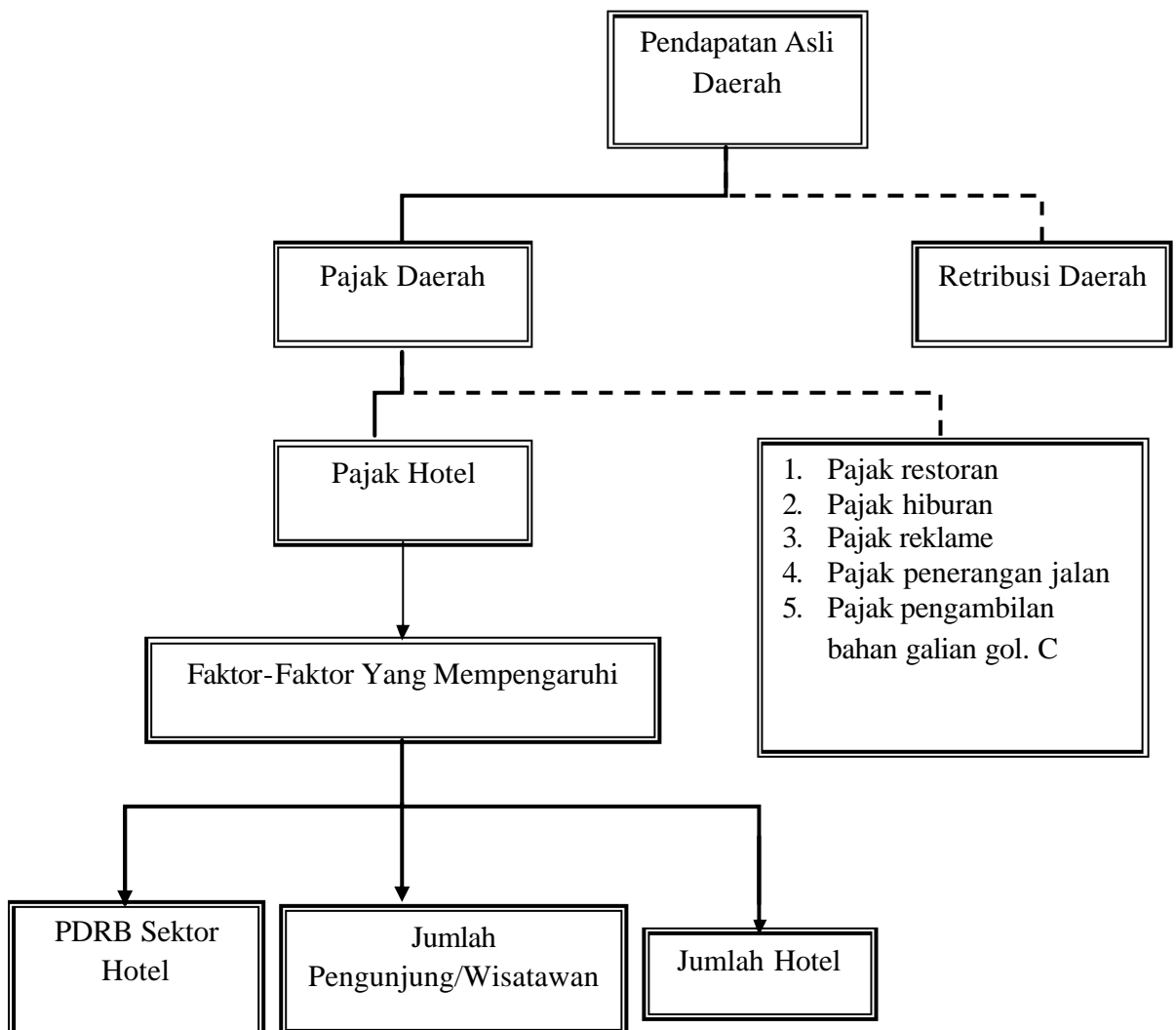
Jumlah pengunjung/ wisatawan. memiliki hubungan fungsional terhadap penerimaan Pajak Hotel. Semakin besar jumlah pengunjung otomatis menambah penerimaan dan sifatnya bukan sebagai identity karena objek pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak hotel.

Jumlah hotel adalah banyaknya jumlah hotel yang tersedia di kota Kendari menggambarkan seberapa banyak jumlah pengunjung yang dapat

menikmati fasilitas akomodasi hotel.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan penerimaan pajak hotel dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Pikir



H. Hipotesis.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan dan dikaitkan dengan tujuan dari penelitian ini maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diduga bahwa PDRB Sektor Hotel ,Jumlah Pengunjung/wisatawan, dan Jumlah Hotel secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari khususnya pada Kantor Walikota Kendari (Dinas Pendapatan, Kantor Pariwisata, Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literature dan publikasi lainnya oleh lembaga/instansi yang berwenang berupa

1. Perkembangan realisasi penerimaan Pajak hotel Kota Kendari, tahun 1996 sampai dengan tahun 2005.
2. Perkembangan variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel, yang meliputi data :
 - PDRB sektor Hotel Kota Kendari tahun 1996-2005.
 - Jumlah Pengunjung/ wisatawan di Kota Kendari tahun 1996-2005
 - Perkembangan jumlah hotel di kota Kendari tahun 1996-2005.
3. Data-data lain yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan tehnik pengumpulan data :

- a. Dokumentasi : untuk memperoleh data tertulis yang bersumber dari buku-buku, laporan atau publikasi lainnya.
- b. Wawancara : dilakukan jika masih terdapat data yang belum diperoleh dengan metode dokumentasi. Teknik ini digunakan dengan cara tatap muka langsung dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan bebas, terstruktur dengan materi yang disesuaikan.

D Metode Analisis

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk pemecahan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan alat analisis Regresi Berganda dengan menggunakan alat bantu soft ware SPSS for windows 11.00.

Adapun bentuk dari formulasi metode regresi adalah dengan menurunkan fungsi non-linier sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3}$$

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + e \quad (\text{Yuwono : 2004})$$

Dimana :

Y : Pajak Hotel

X₁ : PDRB Sektor hotel (harga konstan tahun 2000 dalam
juta rupiah)

X₂ : Jumlah Pengunjung/wisatawan (orang)

X₃ : Jumlah Hotel (Unit)

β₀ : Konstanta

β₁.....β₃ : adalah parameter-parameter yang dicari.

e : Error term.

Untuk Mengetahui tingkat hubungan daripada koefisien yang diperoleh, maka akan di uji dengan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Uji } f = \frac{R^2(n - k - 1)}{k(1 - R^2)}$$

Dimana :

n : Jumlah responden

k : Jumlah variable bebas

Hasil F_{hitung} nantinya dibandingkan dengan F_{tabel} apabila :

$F_{hitung} < F_{tabel}$ berarti hipotesis ditolak.

$F_{hitung} > f_{tabel}$ berarti hipotesis diterima

$$\text{Uji } t = \frac{b_1 - \beta_0}{sb_2}$$

$$\text{Uji } t = \frac{b_2 - \beta_0}{sb_2}$$

Hasil t_{hitung} nantinya dibandingkan dengan t_{tabel} apabila :

$t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ berarti hipotesis diterima

$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ berarti hipotesis ditolak

Uji Asumsi Klasik.

Sebelum menginterpretasikan persamaan regresi dan pengujian signifikansi, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Estimasi persamaan regresi dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square*) mengasumsikan non-multikolinieritas, homoskedastisitas, dan non-otokorelasi.

a. Pengujian gejala multikolinieritas.

Asumsi klasik bahwa di dalam model tidak terdapat kolinearitas ganda (*non-multicollinearity*) di antara variabel bebas (X_i). Pendeteksian gejala multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan formula (Supranto, 1995 dan Gujarati, 1988) sebagai berikut :

$$F_i = \frac{R^2_{x_1, x_2, \dots, x_k} / (k - 2)}{(1 - R^2_{x_1, x_2, \dots, x_k}) / (n - k - 1)}$$

Dimana F_i mengikuti distribusi F dengan derajat bebas $(k-2)$ $(n-k+1)$, n = banyaknya elemen sample, k = banyaknya variabel bebas ditambah titik potong (*intercept*) dan $R^2_{x_1, x_2, \dots, x_k}$ = koefisien determinasi dalam regresi

variabel X_i terhadap sisa variabel bebas lainnya. Hipotesis yang akan diuji adalah :

$$H_0 = R^2_{x_1, x_2, \dots, x_k} = 0$$

$$H_1 = R^2_{x_1, x_2, \dots, x_k} \neq 0$$

Bilamana: $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak ada multikolinearitas)

$F_{hitung} = F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (ada multikolinearitas)

Oleh karena estimasi persamaan regresi dalam penelitian ini menggunakan aplikasi program SPSS, dimana telah tersedia fasilitas uji multikolinearitas yang ditunjukkan oleh koefisien VIF, maka pemeriksaan gejala kolinearitas ganda terjadi jika nilai VIF > 10 (Welch dan Comer, 2002) untuk masing-masing variabel bebas (X_i).

b. Pengujian gejala heteroskedastisitas.

Gejala heteroskedastisitas terjadi jika varian kesalahan pengganggu bervariasi mengikuti perubahan pada variabel bebas. Pendektasian gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Goldfeld-Quandt test* (Greene, 1990 dan Riza, 1984). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Nilai pengamatan yang diduga terdapat heteroskedastisitas disusun mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.
2. Pengamatan dibagi dua kelompok, yaitu kelompok I dan II, jika jumlah pengamatan merupakan bilangan ganjil maka pengamatan yang tengah dibuang.

3. Menghitung jumlah kuadrat residu (JK_{res}) dari masing-masing kelompok.

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 = s_1^2 = s_2^2$$

$$H_0 = s_1^2 = s_2^2$$

Pengujian hipotesis menggunakan formula :

$$F_{hitung} = \frac{Jkres_1 / (n_1 - k)}{Jkres_2 / (n_2 - k)}$$

Dimana : n = jumlah elemen pengamatan dan k = jumlah variabel

Bilamana : $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima (homoskedastis)

$F_{hitung} = F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (heteroskedastis).

- c. Pengujian gejala otokorelasi.

Gejala korelasi serial (otokorelasi) terjadi jika terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu. Hipotesis yang diuji adalah :

H_0 = tidak ada otokorelasi positif atau negatif.

H_1 = terdapat otokorelasi positif atau negatif.

Pendeteksian gejala otokorelasi dalam studi ini menggunakan *Durbin-Watson Statistic* (Supranto, 1995 dan Gujarati, 1988) yang mengikuti proses sebagai berikut :

1. Membuat regresi dengan OLS dan menghitung perkiraan kesalahan pengganggu $e_i = Y_t - Y_t^*$.
2. menghitung d dengan menggunakan rumus :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e^2}$$

3. Bilamana statistik yang diperoleh terletak :

$d < d_L$: Tolak H_0 (terdapat otokorelasi positif)

$d > 4 - d_L$: Tolak H_0 (terdapat otokorelasi negatif)

$d_L < d < 4 - d_L$; Terima H_0 (tidak ada otokorelasi positif dan negatif)

$d_L = d = d_U$ atau $4 - d_U = d = 4 - d_L$ (tak dapat disimpulkan)

E Definisi Operasional

1. **Penerimaan Pajak hotel**, adalah hasil pungutan pajak hotel yang dikumpulkan oleh para wajib pajak setiap tahun dan disetorkan kepada kas Pemerintah Kota Kendari
2. **PDRB Sektor Hotel**, adalah nilai tambah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor hotel atas dasar harga konstan dalam suatu daerah dalam hal ini adalah Kota Kendari.
3. **Jumlah Pengunjung /wisatawan** adalah banyaknya orang yang datang berkunjung ke Kota Kendari dan dapat menggunakan jasa hotel untuk menginap dan menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh hotel.
4. **Jumlah Hotel**, adalah banyaknya jumlah hotel setiap tahun yang berada di Kota Kendari

BAB IV

Gambaran umum dan Hasil Penelitian

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Sejarah Kota Kendari.

Kota Kendari terletak pada 03° - 04°, 25' Lintang Selatan dan diantara 121°, 73'-123°, 15' Bujur Timur yang membentang mengelilingi Teluk Kendari. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda merupakan ibukota kewedanan dan ibukota *Onder afdeling* Laiwoi dengan luas wilayah pada waktu itu $\pm 31.420 \text{ Km}^2$. Sejalan dengan perkembangan sebagai daerah pemukiman, pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau, maka Kota Kendari berkembang menjadi ibukota Kabupaten Kendari berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Jo UU Nomor 13 tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara yang terdiri atas dua wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas wilayah 76,76 Km^2 . Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 Kota Kendari ditetapkan pemerintah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 295,89 Km^2 yang meliputi Kecamatan Kendari, Poasia, Mandonga, dan Kecamatan Baruga.

Kota Kendari terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Kota Administratif menjadi Kotamadya Dati II Kendari, yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 dan diresmikan pada tanggal 27 September 1995 oleh Menteri Dalam Negeri (Yogie S. Memet) sekaligus menetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Ulang Tahun Kota Kendari.

Kota Kendari sejak menjadi Ibukota *Onder afdeling* Laiwoi, mulai melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, hal ini tentunya tidak terlepas dari dinamika pembangunan dan dibuktikan dengan adanya pemekaran wilayah mulai dari luas 31,42 Km² sampai pada saat ini seluas 295,89 Km².

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Ditinjau dari administrasi pemerintahan, Kota Kendari sebagai salah satu Daerah Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki enam wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli dan Kecamatan Baruga, dengan jumlah Kelurahan sebanyak 54 Kelurahan, luas wilayah ± 295,89 Km² atau 29,589 Ha, dimana sesuai hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Tenggara, terjadi penambahan luas wilayah Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia. Lebih jelasnya wilayah Kota Kendari, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 . Luas Wilayah Kota Kendari

No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Kendari	14.21
2	Kendari Barat	21.29
3	Mandongga	79.23
4	Poasia	58.63
5	Baruga	49.40
6	Abeli	73.13
Jumlah		295.89

Sumber : Kantor Bappeda Kota Kendari, Tahun 2006

Tabel.3. memperlihatkan bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Poasia (44,53%), sementara Kecamatan Kendari merupakan wilayah kecamatan terkecil dengan hanya 11,99% dari cakupan luas wilayah. Secara fisik, Kota Kendari terletak di Teluk Kendari yang berhadapan langsung ke Laut Banda dengan membentuk hampir satu lingkaran disepanjang tepi. Selain itu wilayah Kota Kendari secara keseluruhan dikelilingi oleh Kecamatan - kecamatan dari Kabupaten Kendari yang secara administrasi berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda dan Kecamatan moramo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Konda
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto dan Sampara

3. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Sesuai data tahun 2003 penduduk Kota Kendari sebanyak 221.723 jiwa yang terdiri atas 111.793 laki-laki dan 109.840 perempuan yang selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Penduduk Kota Kendari Menurut Jenis Kelamin 2001s/d 2005

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2001	89.237	90.226	179.463
2002	101.145	103.146	204.291
2003	102.77	101.379	204.239
2004	105.555	103.572	209.217
2005	111.793	109.84	221.723

Perkembangan penduduk Kota Kendari secara umum dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, urbanisasi dan migrasi desa-desa kota dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 5,98% pada tahun 2003, yang sangat berhubungan dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana perkotaan termasuk penyediaan jasa perkotaan berupa pasar serta rumah makan beserta sarana pendukung di daerah perkotaan sebagai upaya memenuhi kemampuan kota sebagai pusat pelayanan.

b. Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian sangat berhubungan dengan upaya pemenuhan jasa ekonomi kota. Jumlah penduduk usia angkatan kerja sebanyak 87,318 jiwa atau \pm 51% dari jumlah penduduk kota. Penduduk yang bekerja dapat diklasifikasikan dalam beberapa mata pencaharian antara lain sebagai berikut :

Tabel. 5. Jenis Lapangan Usaha Penduduk Kota Kendari 2005

Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persen(%)
Pertanian	16,000	18.44
Industri	2,500	2.86
Konstruksi	1,700	1.95
Niaga	8,300	9.51
Transportasi	2,100	2.40
Jasa social	40,900	46.84
Lain-lain	15,718	18
Jumlah	87,218	100

Sumber Data: Kantor Slatistik Kota Kendari, Tahun 2005

c. Pendapatan Penduduk

Berdasarkan jenis mata pencaharian penduduk, menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk Kota Kendari, pada Tahun 2004 adalah Rp. 2.101.795,42, dimana pada tahun sebelumnya Rp. 1.797.156.22, yang berarti ada kenaikan sebesar kurang lebih 13,18%.

4. Kondisi Sosial Budaya

Kota Kendari sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan fungsi ibukota propinsi, membawa konsekuensi dengan tingkat urbanisasi cukup tinggi. Dari kenyataan yang ada, pengaruh sosial budaya sangat bervariasi (heterogen) dimana mereka akan membawa kultur sosial masing-masing dari daerah asalnya, sehingga walaupun mereka berada di kota, tetapi pola hidup masih menggambarkan pola hidup pedesaan. Sebagai akibatnya, yang tidak dapat di hindari adalah proses pembentukan perpaduan kultur, yang akan melahirkan dua macam kondisi yaitu : kondisi yang berdampak positif dan kondisi yang berdampak negatif.

a. Dampak Positif

Sejak terbentuknya Kota Kendari, daerah ini telah memperlihatkan peningkatan pembangunan di segala bidang. Peningkatan tersebut dapat dilihat baik fisik maupun non fisik, yang memberi gambaran keberlanjutan pembangunan kota sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hal ini terbukti munculnya kompetisi di beberapa aspek kegiatan kota seperti perdagangan dan jasa, pendidikan, industri kecil, perumahan, dan sektor informal.

b. Dampak Negatif

Tingkat sosial budaya masyarakat yang heterogen, maka kebiasaan-kebiasaan di daerah asalnya turut mempengaruhi sendi-sendi kehidupan

mereka dan bila dikaitkan dengan persaingan kehidupan kota, maka menambah semakin kompleksnya persoalan-persoalan sosial yang muncul.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Heterogen struktur sosial budaya masyarakat secara intern telah mewujudkan suatu kondisi sosial ekonomi yang beragam, komposisi yang demikian ini memberi warna serta gambaran secara nyata dominasi salah satu aktifitas ekonomi yakni kegiatan perdagangan dan jasa serta rekreasi, yang memerlukan sarana penunjang berupa pasar dan pertokoan.

Sebelum membahas tentang kecenderungan perkembangan kawasan perkotaan di Kota Kendari, maka sebelumnya akan disampaikan terlebih dahulu Bagian Wilayah Kota (BWK) berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RTRW), sampai tahun perencanaan 2010 adalah:

BWK I meliputi: Kawasan pusat Kota Kendari (sebagai Kecamatan Mandonga dan Kec. Baruga) berfungsi sebagai pusat Pemerintahan Kota, pusat perdagangan, dan jasa serta untuk kegiatan pariwisata.

BWK II meliputi : Kawasan Kendari pantai (Kec.Kendari), fungsi utama kawasan sebagai daerah pariwisata dan jasa hotel/restoran.

BWK III meliputi : Kawasan kota lama (Kec. Kendari) dengan fungsi utama areal perdagangan dan jasa pelabuhan.

BWK IV meliputi : Kawasan Poasiah (Kec. Poasiah) dengan fungsi utama kawasan sebagai pusat industri utamanya agroindustri serta areal peternakan.

BWK V meliputi : Kawasan anduonohu (Kec.Poasiah), dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Propinsi,pusat pendidikan dan kegiatan agroindustri.

BWK VI meliputi : Kawasan Baruga (Kec.Baruga), dengan fungsi utama sebagai kawasan pemukiman dan pendidikan skala menengah.

BWK VII meliputi : Kawasan Puwatu (Kec. Mandongan), dengan fungsi utama sebagai pusat industri dan perdagangan serta perbengkelan.

Pengembangan sektor jasa perkotaan dengan potensi yang ada sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dalam bidang pelayanan dan jasa. Dengan pengembangan kawasan pemerintahan tingkat provinsi yang ada di Kecamatan Poasia dan pengembangan kawasan pemerintahan untuk tingkat kecenderungan pengembangan kota kedepan berada di Kecamatan Poasia dan Baruga.

Pengembangan sektor pariwisata, baik untuk skala kota maupun untuk potensi pariwisata, dengan potensi Teluk Kendari yang merupakan salah satu kekhasan yang jarang ditemui di dunia, (luasnya sekitar 1.227,77 Ha) yang diidentifikasi sebagai Estuaria (salah satu jenis ekosistem yang secara

permanen atau berkala tergenangi oleh air), yang menggambarkan bahwa estuaria dapat terbentuk jika teluk di pesisir sebagian tertutup, serta merupakan pertemuan dan percampuran air tawar (Sungai Wanggu dan sungai keci lainnya), dengan air laut (Laut Banda).

Karena merupakan estuaria, maka daerah tersebut didominasi oleh substrat lumpur berupa endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut yang sebagian besar bersifat organik, sehingga dengan sendirinya substrat tersebut merupakan cadangan makanan yang besar bagi organisme yang hidup di Estuaria Teluk Kendari. Selain potensi secara organik (hubungan dengan lingkungan hidup), Teluk Kendari memiliki kekhasan, dimana estuaria yang mempunyai panjang dari tepi sebelah timur (depan pulau Bungkutoko) sampai di Kelurahan Korumba adalah ± 7.500 meter, lebar terbesar ± 3.000 meter dan lebar terkecil ± 300 meter dengan kedalaman perairan antara 8 sampai 19 meter dpl. Estuaria tersebut cukup unik (hubungan dengan pariwisata) yang termasuk jarang ditemukan di dunia.

B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan sumbangan atau dukungan oleh pertumbuhan sektoralnya, demikian pula pertumbuhan ekonomi Kota Kendari dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 1998 adalah sebesar Rp. 262.035,07 juta meningkat menjadi Rp. 269.955,33 juta atau terjadi pertumbuhan sebesar 3,02 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6,14 persen. Peningkatan tersebut sampai di tahun 2000 sebesar Rp. 848,2 miliar, tahun 2001 menjadi 980,1 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 15,5 persen. Pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 1.000,5 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 2,09 persen, kemudian pada tahun 2003 menjadi Rp. 1.067,0 miliar atau sebesar 6,63 persen. Dan nilai tersebut menjadi Rp. 1.167,0 miliar atau terjadi pertumbuhan sebesar 9,37 persen pada tahun 2004.

Adapun sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Kendari tersebut yaitu sektor pertanian tumbuh sebesar 5,40 persen, sektor pertambangan dan penggalan tumbuh sebesar 14,49 persen; sektor industri pengolahan sebesar 6,89 persen; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 37,07 persen; sektor konstruksi sebesar 5,99 persen; sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 9,11 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 8,64 persen; sektor persewaan dan jasa-jasa sebesar 31,76 persen serta sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 3,73 persen.

Tabel.6. Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari periode 1996-2004

No	Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	Pertanian	2.83	54.8	0.99	-8.8	-9.1	4.86	4.77	1.85	5.4
2	Pertambangan dan Penggalian	9.7	4.64	-13	2.25	7.23	3.81	13.1	0.99	15
3	Industri Pengolahan	61.6	11.6	-15	11.4	5.15	1.02	0.32	6.24	6.89
4	Listrik dan Air Minum	16.9	29.2	12.3	12.1	14.1	7.61	7.26	19	37.1
5	Banguna&Kontruksi	9.37	2.83	-36	1.53	11.8	6.82	7.32	2.42	5.99
6	Perdagangan,Hotel dan Restoran	15	30.4	-1.5	0.4	13.3	48.7	-12	-1.8	9.4
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.79	10.5	11.7	5.2	15.2	15.4	0.54	10.8	8.64
8	Keuangan,Persewaan, dan Jasa Perusahaan	50.4	-13	-38	10.6	-1.4	12.5	17.8	49.9	31.8
9	Jasa-Jasa	2.21	2.11	-3.5	2.79	2.95	3.23	4.31	3.86	3.73
	Pertumbuhan Ekonomi	14.1	13	-6.1	3.02	7.91	15.3	2.09	6.63	9.37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kendari

Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor produksi dan masing-masing sektor produksi tersebut dirinci menjadi beberapa sub sektor. Pemecahan menjadi sub sektor ini sedapat mungkin sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha di Indonesia.

C. Keadaan Perhotelan

Mengingat Kota Kendari tidak memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, maka Kota Kendari harus memperkuat potensi dalam bidang jasa dan pelayanan serta jasa pendukung lainnya berupa penyediaan hotel yang representative agar para industriawan yang membuka pabrik di luar kota dapat berkantor di Kota kendari sesuai dengan potensi jasa perkotaan yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah sekitar.

Perkembangan perhotelan di Kota Kendari telah berkembang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan atau bertambahnya jumlah hotel di kota Kendari setiap tahunnya yang dimulai sejak tahun 1996 sebanyak 29 unit dengan jumlah kamar 345, sedangkan dalam kurun waktu 1997 sampai dengan 1999 tidak terlihat perubahan yang berarti dalam hal penambahan jumlah akomodasi hotel.

Keadaan tahun 2000 nampak ada peningkatan dilihat dari jumlah akomodasi hotel,maupun fasilitas yang tersedia. Dari jumlah 35 unit yang tersedia pada tahun1999 dengan jumlah kamar 433 meningkat menjadi 41 unit dengan jumlah kamar sebanyak 460 unit.

Selama kurung waktu lima tahun terakhir tahun 2001-2005 perkembangan jumlah hotel di Kota Kendari memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti yang pada tahun 2001 jumlah hotel meningkat sebanyak 46 unit dengan jumlah kamar 497 unit,tahun 2002 jumlah hotel naik menjadi 49 unit dengan jumlah kamar 524 unit,tahun 2003 menjadi 52 unit dengan jumlah kamar 555 unit, tahun 2004 menajadi 57 unit dengan jumlah kamar 636 unit,dan pada tahun 2005 berkembang menjadi 62 unit dengan jumlah kamar sebanyak 715 unit.

Selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kendari Tahun 1996-2005

No	Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1	1996	29	345
2	1997	33	410
3	1998	34	404
4	1999	35	433
5	2000	41	460
6	2001	46	497
7	2002	49	524
8	2003	52	555
9	2004	27	636
10	2005	62	715

Sumber :BPS kota Kendari

D. Perkembangan Pajak Hotel

Selama kurung waktu Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2005, pertumbuhan pendapatan pajak hotel menunjukkan ternd yang pluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29.37 % pertahun.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan realisasi pendapatan Pajak Hotel dari tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun 2005 dapat digambarkan pada tabel berikiut ini :

Tabel 8. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari 1996-2005

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel	
	Realisasi	Perubahan
	(Rp)	(%)
1996	19.904.871	
1997	32.937.828	65,48
1998	33.821.133	2,68
1999	49.291.130	45,74
2000	57.983.007	17,63
2001	79.300.674	36,77
2002	103.109.417	30,02
2003	104.903.702	1,74
2004	123.452.600	17,68
2005	202.057.450	63,67
Rara-rata Perubahan 1996 - 2005		29,37

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kendari

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan realisasi pajak hotel mengalami peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu 65,48%. Kemudian pada tahun 1998 terjadi penurunan sebesar 2,68% akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu dan berdampak di daerah-daerah. Kemudian pada tahun 1999 kembali naik sebesar 45,74, sedangkan pada tahun 2003 kembali terjadi penurunan sebesar 1,74 yang diakibatkan kondisi keamanan di Indonesia yang tidak menentu sehingga mengakibatkan peng unjung/wisatawan baik lokal maupun asing mengurangi kunjungan mereka ke Indonesia khususnya daerah tempat-tempat wisata yang pada saat itu berdampak juga di kota Kendari. Tahun 2005 terjadi lagi kenaikan yang cukup besar dibanding tahun

sebelumnya yaitu sebesar 63,67%, hal ini terjadi akibat bertambahnya jumlah hotel di kota Kendari karena pada saat itu di kota Kendari sedang dalam persiapan kegiatan nasional yaitu Musabaqah Tilawatil Al-Qur'an yang pada tahun 2006 di adakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

E. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Kota Kendari secara keseluruhan selama 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2005, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD kota Kendari 1996-2005

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (%)	Penerimaan PAD (%)	Kontribusi (%)
1	1996	19.904.871	2,157,836,141	0,92
2	1997	32.937.828	3,167,789,187	1,04
3	1998	33.821.133	3,750,097,129	0,90
4	1999	49.291.130	4,105,364,185	1.20
5	2000	57.983.007	4,123,033,539	1,40
6	2001	79.300.674	8,759,542,302	0,91
7	2002	103.109.417	12,261,041,394	0,84
8	2003	104.903.702	13,789,839,100	0,76
9	2004	123.452.600	14,112,540,263	0,87
10	2005	202.057.450	15,978,176,681	1,27
Rata-rata				1,02

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kendari

Dari Tabel 9 memperlihatkan kenaikan PAD Kota Kendari yang terus meningkat setiap tahun. Dengan kenaikan PAD tersebut, mengakibatkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 1996 sebesar 0,92 %, selanjutnya tahun 1997 naik sebesar 1,04 %,

selanjutnya tahun 1998 turun lagi sebesar 0,90 %, selanjutnya pada tahun 1999 dan tahun 2000 kembali naik, tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 turun lagi dan kembali naik sebesar 1,27 % pada tahun 2005.

F. Perkembangan PDRB Sektor Hotel

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Menurut Devas (1989) :

” Dari sisi daya guna ekonomi, Pajak Hotel dan Restoran dianggap cukup adil karena golongan kaya cenderung membelanjakan bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk hotel di banding kelompok miskin.”

PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang di nilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun dasar. PDRB atas harga konstan dihitung berdasarkan kuantum barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Pertumbuhan PDRB atas harga konstan menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi.

PDRB dari tahun 1996 sampai tahun 1999 menggunakan harga konstan tahun 1993 sedangkan PDRB dari tahun 2000 sampai tahun 2005 menggunakan harga konstan tahun 2000. Perubahan tahun dasar dari 1993 ke tahun dasar 2000 yaitu karena setelah krisis ekonomi yang berawal pada tahun 1997. Tahun 2000 dipandang sebagai tahun dimana kondisi perekonomian mulai relatif stabil di hampir seluruh bagian wilayah Indonesia

dan perkembangan ekonomi global dalam kurun waktu 1993-2000 sangat pesat yang berpengaruh terhadap struktur ekonomi nasional sehingga dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian tahun 1993 sudah berubah pada tahun 2000.

Kemajuan ekonomi sektor perhotelan dapat dilihat melalalui besaran PDRB perdagangan, Hotel dan Restoran dengan sub sektor perhotelan. Sektor ini berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa dimana rata-rata pertumbuhan sebesar 7.77 % pertahun. Walaupun Pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan yaitu tahun 1998 pertumbuhan negatif sebesar -8.15 %,tahun 1998 sebesar -7.43 serta tahun 2004 sebesar -6.48 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Perkembangan PDRB Sektor Hotel di Kota Kendari atas Dasar Harga Konstan 1996-2005

Tahun	PDRB Sektor Hotel (Harga Konstan)	
	Realisasi (Juta Rp)	Perubahan (%)
1996	509	
1997	729	43.27
1998	670	-8.15
1999	620	-7.43
2000	674	8.71
2001	800	18.71
2002	810	1.23
2003	874	7.91
2004	817	-6.48
2005	998	22.15
Rata-rata Perubahan 1996-2005		7.77

Sumber : Bada Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari 2005

G. Perkembangan Jumlah Pengunjung / wisatawan

Pengunjung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Pengunjung merupakan subyek pajak hotel yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disiapkan oleh pengusaha hotel. Besar kecilnya jumlah omzet yang diterima oleh pengusaha ditentukan oleh jumlah pengunjung yang menikmati fasilitas yang disiapkan oleh pengusaha hotel dan sebagai penanggung jawab pajak adalah pengusaha rumah penginapan. (Muqoddim, 1999)

Salah satu indikator yang menunjukkan kemajuan dalam sektor perhotelan adalah tingkat penghunian kamar yang ditandai dengan banyaknya jumlah pengunjung yang dapat menikmati jasa pelayanan hotel, makin tinggi angka tingkat penghunian kamar yang dimiliki oleh sekelompok hotel/akomodasi pada suatu daerah, menunjukkan makin sehatnya kehidupan perhotelan tersebut.

Perkembangan jumlah pengunjung/ wisatawan di Kota Kendari selama kurun waktu Tahun Anggaran 1996 sampai dengan tahun 2005 rata-rata tumbuh sebesar 11.44 % pertahun, pada tahun 1998 terjadi penurunan jumlah pengunjung sebesar -3.88 %, kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2003 mengalami lagi penurunan sebesar -10.68 dan -10.41.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 11. Perkembangan Jumlah Pengunjung/ Wisatawan di Kota Kendari 1996-2005

Tahun	Jumlah Pengunjung /Wisatawan	
	Realisasi (Orang)	Perubahan (%)
1996	23.504	
1997	28.324	20.51
1998	27.224	-3.88
1999	42.340	55.52
2000	37.816	-10.68
2001	45.363	19.96
2002	50.279	10.84
2003	45.043	-10.41
2004	49.103	9.01
2005	62.289	26.85
Rata-rata perubahan 1996-2005		11.44

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari 2005

H. Perkembangan Jumlah Hotel

Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah, pajak hotel cocok untuk daerah perkotaan. Pajak Hotel sangat cocok pada daerah perkotaan karena objek pajak jelas tempatnya dan tempat memungut biasanya sama dengan tempat beban pajak (Devas, 1989).

Perkembangan jumlah Hotel di kota Kendari dari tahun 1996 hingga tahun 2005 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8.81 % pertahun, dimana pada tahun 1998 terjadi penurunan sebesar 3.03 %, kemudian pada tahun 1999 turun lagi sebesar 2.94 %, kemudian pada tahun 2000 terjadi peningkatan sebesar 17.14 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kendari 1996-2005

Tahun	Jumlah Hotel	
	Realisasi	Perubahan
	(unit)	(%)
1996	29	
1997	33	13.79
1998	34	3.03
1999	35	2.94
2000	41	17.14
2001	46	12.20
2002	49	6.52
2003	52	6.12
2004	57	9.62
2005	62	8.77
Rara-rata Perubahan 1996 – 2005		8.81

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kendari 2005.

I. Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan ,dan Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

1. Model Persamaan Regresi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung /wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari. Dengan demikian, dalam model ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh data mengenai perkembangan variabel yang tercakup dalam model analisis ini seperti pada Tabel 12. Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS untuk mengestimasi persamaan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 13, dapat dibuat model persamaan

regresi pengaruh PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/ Wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3), terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari, sebagai berikut :

$$\ln Y = 0,0763 + 0,4621 \ln X_1 + 0,9050 \ln X_2 + 1,4093 \ln X_3$$

Tabel 13. Perkembangan PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/ Wisatawan (X_2), Jumlah Hotel (X_3), dan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari Tahun 1996 - 2005

Tahun	Pajak Hotel (Rp) Y	PDRB Sektor Hotel (Konstan) (juta Rp) X_1	Jumlah Pengunjung/ Wisatawan (orang) X_2	Jumlah Hotel (unit) X_3
1996	19,904,871	509	23,504	29
1997	32,937,828	729	28,324	33
1998	33,821,133	670	27,224	34
1999	49,291,130	620	42,340	35
2000	57,983,007	674	37,816	41
2001	79,300,674	800	45,363	46
2002	103,109,417	810	50,279	49
2003	104,903,702	874	45,043	52
2004	123,452,600	817	49,103	57
2005	202,057,450	998	62,289	62

Sumber : Dinas Pendapatan, BPS Kota Kendari 2005

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/ wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari (Y), sebagaimana di tunjukkan oleh tanda koefisien regresi. Ini berarti bahwa setiap kenaikan yang terjadi pada variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah

Pengunjung/ wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3) akan diikuti oleh kenaikan penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari (Y); sebaliknya, setiap penurunan yang terjadi pada variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/wisatawan (X_2) , dan Jumlah Hotel (X_3) akan diikuti oleh penurunan penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari (Y); dengan asumsi faktor lain tetap konstan.

Tabel 14. Hasil analisis pengaruh PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/Wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	t-Test	Signifikansi
(Constant)	0,0763	1,0808	0,0706	0,9460
PDRB Sektor Hotel	0,4621	0,1751	2,6391	0,0386
Pengunjung /wisatawan	0,9050	0,1154	7,8446	0,0002
Jumlah Hotel	1,4093	0,1884	7,4791	0,0003
R Squared =	0,9976			
Adjusted R Squared =	0,9963			
Multiple R =	0,9988			
D. W. Test =	2,1079			

Sumber : Hasil penelitian setelah diolah, 2006

2. Uji Asumsi Klasik.

Sebelum menginterpretasikan hasil analisis regresi yang telah diperoleh, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Estimasi persamaan regresi dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square*) mengasumsikan non-multikolinearitas, homoskedastisitas, dan non-otokorelasi

Uji multikolinearitas. Asumsi klasik bahwa di dalam model tidak terdapat kolinearitas ganda (*non-multicolinearity*) di antara variabel bebas (Xi). Gejala kolinearitas ganda terjadi jika nilai VIF > 10 (Welch dan Comer,2002) dari masing-masing variabel bebas (Xi). Berdasarkan hasil analisis *Collinearity statistics* pada lampiran 3 menunjukkan bahwa tidak satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIF > 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala kolinearitas ganda di dalam model fungsi regresi yang telah diperoleh.

Uji gejala heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas terjadi jika varian kesalahan pengganggu bervariasi mengikuti perubahan pada variabel bebas. Pendektesian gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan cara *Goldfeld* dan *Quandt*, yakni dengan membagi observasi (sampel) ke dalam dua kelompok tersebut. Hasil analisis regresi memberikan jumlah kuadrat residu untuk kelompok I $Se_1^2 = 0,0016$ dan untuk kelompok II $Se_2^2 = 0,0018$ (lampiran 4), sehingga nilai F_{hitung} adalah:

$$F_{hitung} = \frac{0,0018/1}{0,0016/1} = 1,1577$$

Karena $F_{hitung} = 1,1577 <$ dari $F_{0,05(1)(1)} = 16,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok tersebut berasal dari populasi yang sama, atau model regresi yang telah diperoleh memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji gejala korelasi serial (otokorelasi). Gejala korelasi serial terjadi jika terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu. Pendektesian gejala korelasi serial dalam penelitian ini menggunakan *Durbin-watson Statistic*. Hasil analisis seperti pada tabel 14 memberikan nilai *Durbin-Watson Test* (dw) = 2,1079, sementara nilai tabel *Durbin-Watson Statistic* pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ dengan variabel bebas (k) = 3 dan jumlah observasi (n) = 10 diperoleh nilai $d_L = 0,82$, $d_U = 1,75$, $(4 - d_L) = 2,25$, dan $(4 - d_U) = 3,18$. Karena *Durbin-Watson Test* (dw) terletak di antara d_U dan $4 - d_U$ atau $1,75 < 2,1079 < 2,25$, maka *Durbin-Watson Statistic* menyimpulkan bahwa dalam model regresi yang telah diperoleh tidak terdapat korelasi serial (otokorelasi).

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa dalam model fungsi regresi yang telah diperoleh, memenuhi asumsi: non-multikolinearitas, homoskedastitas, dan non-otokorelasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model fungsi regresi yang telah diperoleh memiliki sifat pemerkiraan linier terbaik tak bias (*best liniear unbiased estimator = BLUE*)

3. Interpretasi Hasil Analisis

Hasil analisis pengaruh PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12, menghasilkan nilai koefisien determinasi ($\text{adjusted R Squared} = R^2$) = 0.9963. Ini berarti bahwa variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/wisatawan (X_2), dan

Jumlah Hotel (X_3) secara simultan dapat menjelaskan (menyumbang) 99,63 persen dari variasi tinggi rendahnya Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari, selebihnya (0,37 persen) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model regresi yang digunakan. Hubungan simultan variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3) dengan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari seperti ditunjukkan oleh koefisien korelasi (*Multiple R*) = 0.9988, mengindikasikan tingkat hubungan yang sangat kuat.

Uji signifikansi pengaruh variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari, menggunakan uji-Fisher (uji-F). Hipotesis yang akan diuji adalah:

Kriteria pengujian:

Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $F_{hitung} = F_{0,01} (3) (6)$

Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $F_{hitung} > F_{0,01} (3) (6)$

Tabel 15. Analisis varians pengaruh PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/Wisatawan(X_2), dan Jumlah Hotel (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari

Sources	Sum of Squares	Of	Mean Square	F	Sig,
Regression	4.5474	3	1.5158	819,8284	0,0000
Residual	0,0111	6	0,0018		
Total	4.5584	9			

Sumber : Hasil Penelitian setelah diolah,2006

Hasil analisis sebagaimana disajikan pada Tabel 15 memberikan nilai $F_{hitung} = 819,8284 > F_{0,01}(3)(6) = 9,78$. Ini berarti bahwa PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/ wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari pada taraf signifikansi (α) 0,01 atau 1 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ wisatawan, dan Jumlah Hotel, secara simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel, dengan ini dinyatakan diterima.

Uji signifikansi pengaruh variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/ wisatawan (X_2), Jumlah Hotel (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) secara parsial, menggunakan uji parsial dengan menggunakan uji Student (uji-t).

Konstanta Model. Nilai konstanta model regresi berganda yang diperoleh sebesar 0,0763. Nilai konstanta menunjukkan besarnya presentase penerimaan pajak hotel (y) sebesar 0,0763 jika variabel $X_1, X_2, X_3 = 0$

Pengaruh PDRB Sektor Hotel. Hasil analisis regresi pada Tabel 12, menghasilkan koefisien regresi pengaruh variabel PDRB Sektor Hotel (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 0,4621 dengan nilai t sebesar 2,6391. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel PDRB Sektor Hotel (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari, dilakukan uji parsial dengan menggunakan uji-Student (uji-t).

Kriteria pengujian:

Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $t_{hitung} = t_{0.05(6)}$

Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{0.05(6)}$

Hasil analisis menunjukkan bahwa harga $t_{hitung} = 2,6391 > t_{0,005(6)} = 2,447$. Ini menjelaskan bahwa variabel PDRB Sektor Hotel (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari. Koefisien regresi tersebut menunjukkan elastisitas perubahan Penerimaan Pajak Hotel (Y) terhadap perubahan PDRB Sektor Hotel. Setiap peningkatan PDRB Sektor Hotel (X_1) sebesar 1 %, akan meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 0,4621 %; sebaliknya, setiap penurunan PDRB Sektor Hotel (X_1) sebesar 1%, akan menurunkan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 0,4621% pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5 persen, dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel tetap konstan. Ini berarti bahwa perubahan penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari bersifat inelastis (koefisien elastisitas (e) < 1) terhadap perubahan PDRB Sektor Hotel.

Di duga akibat adanya penyelewengan data dari pengusaha jasa hotel yang tidak melaporkan data penerimaan yang sebenarnya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai petugas pemungut pajak, sehingga penerimaan pajak hotel ini tidak elastis terhadap perubahan PDRB Sektor Hotel.

Koefisien korelasi parsial ($r_{Y1.23}$) sebesar 0,7329, mengindikasikan bahwa antara variabel PDRB Sektor Hotel (X_1) dengan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari, terdapat hubungan yang kuat, yakni sebesar 73,29%

Berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB dapat membawa dampak pada kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal ini kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan pula meningkatkan penerimaan PAD.

Dari sisi daya guna ekonomi Pajak Hotel dianggap cukup adil karena golongan kaya cenderung membelanjakan bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk hotel dibanding kelompok miskin. (Devas, 1989)

Dari hasil regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa PDRB Sektor Hotel memiliki pengaruh yang berarti terhadap tinggi rendahnya penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari, karena semakin banyak masyarakat yang membelanjakan sebagian pendapatannya untuk jasa hotel maka akan semakin meningkatkan penerimaan PDRB Sektor Hotel sehingga penerimaan Pajak Hotel juga ikut meningkat.

Pengaruh Jumlah Pengunjung / Wisatawan. Hasil analisis regresi pada Tabel 14, menghasilkan koefisien regresi pengaruh variabel Jumlah Pengunjung/ wisatawan (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 0,9050 dengan nilai t sebesar 7,8446. Untuk mengetahui

signifikansi pengaruh variabel Jumlah Pengunjung / wisatawan (X_2) terhadap Penerimaan Hotel (Y) di Kota Kendari, dilakukan uji parsial dengan menggunakan uji-Student (uji-t).

Kriteria pengujian:

Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $t_{hitung} = t_{0,01}$ (6)

Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{0,01}$ (6)

Hasil analisis menunjukkan bahwa harga $t_{hitung} = 7,8446 > t_{0,01}$ (6) = 3,707. Ini menjelaskan bahwa variabel Jumlah Pengunjung / wisatawan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari. Koefisien regresi tersebut menunjukkan elastisitas perubahan Penerimaan Pajak Hotel (Y) terhadap perubahan Jumlah Pengunjung/wisatawan (X_2). Setiap peningkatan Jumlah Pengunjung/ wisatawan (X_2) sebesar 1 %, akan meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 0,9050 %; sebaliknya, setiap penurunan Jumlah Pengunjung/wisatawan (X_2) sebesar 1 %, akan menurunkan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 0,9050% pada taraf signifikansi $\alpha = 0,01$ atau 1 persen, dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel tetap konstan. Ini berarti bahwa perubahan penerimaan Pajak Hotel (y) di Kota Kendari bersifat inelastis ($e < 1$) terhadap perubahan Jumlah Pengunjung /wisatawan.

Hal ini diakibatkan oleh karena tidak semua pengunjung/wisatawan menginap di hotel ketika mereka berkunjung ke Kota Kendari, ada yang

hanya sekedar transit untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, ada juga yang menginap tapi tidak di hotel akan tetapi di rumah sanak famili dan ada juga yang tinggal sementara di tempat yang telah disediakan oleh tempat mereka bekerja yang secara kebetulan membuka cabang usaha mereka di Kota Kendari.

Koefisien korelasi parsial ($r_{y2.13}$) sebesar 0,9545, mengindikasikan bahwa antara variabel Jumlah Pengunjung/ wisatawan (X_2) dengan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari, terdapat hubungan yang kuat, yakni sebesar 95,45%.

Subjek Pajak Hotel adalah masyarakat yang melakukan pembayaran karena menikmati fasilitas yang disiapkan oleh pengusaha hotel, dan sebagai penanggung jawab pajak adalah pengusaha rumah penginapan (Muqodim,1999).

Keterkaitan yang erat antara sektor hotel dengan para pengunjung/ wisatawan yang berkunjung ke Kota Kendari akan berdampak pada penerimaan Pajak Hotel, karena salah satu yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan Pajak Hotel adalah jumlah pengunjung yang datang di Kota Kendari baik melalui bandara dan pelabuhan. Karena ada kemungkinan orang yang datang ke Kota Kendari dapat menginap di hotel sehingga pendapatan jasa hotel meningkat dan penerimaan pajak juga ikut meningkat.

Pengaruh Jumlah Hotel. Hasil analisis regresi pada Tabel 12, menghasilkan koefisien regresi pengaruh variabel Jumlah Hotel (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 1,4093 dengan nilai t sebesar 7,4791. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Jumlah Hotel (X_3) terhadap Penerimaan Hotel (Y) di Kota Kendari, dilakukan uji parsial dengan menggunakan uji-Student (uji- t).

Kriteria pengujian:

Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $t_{hitung} = t_{0,01} (6)$

Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{0,01} (6)$

Hasil analisis menunjukkan bahwa harga $t_{hitung} = 7,4791 > t_{0,01} (6) = 3,707$. Ini menjelaskan bahwa variabel Jumlah Hotel (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari. Koefisien regresi tersebut menunjukkan elastisitas perubahan Penerimaan Pajak Hotel (Y) terhadap perubahan Jumlah Hotel (X_3). Setiap peningkatan Jumlah Hotel (X_3) sebesar 1 %, akan meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 1,4093%; sebaliknya, setiap penurunan Jumlah Hotel (X_3) sebesar 1 %, akan menurunkan Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari sebesar 1,4093% pada taraf signifikansi $\alpha = 0,01$ atau 1 persen, dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel tetap konstan. Ini berarti bahwa perubahan penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari bersifat elastis ($e > 1$) terhadap perubahan Jumlah Hotel di Kota Kendari.

Ini terjadi akibat makin baiknya fasilitas- fasilitas penunjang serta pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh jasa hotel, sehingga pengusaha jasa hotel juga menaikkan tarif hotelnya. Akibat dari perbaikan fasilitas dan pelayanan ini memberikan dampak yang positif bagi usaha jasa hotel karena bukan saja tamu hotel yang menginap dapat menikmatinya akan tetapi masyarakat sekitarnya yang ingin menikmati fasilitas pelayanan hotel tanpa harus menginap di hotel tersebut, yang berarti juga meningkatkan pendapatan dari hotel itu sendiri serta penerimaan pajak hotel juga ikut meningkat.

Koefisien korelasi parsial ($r_{y3.12}$) sebesar 0,9503, mengindikasikan bahwa antara variabel Jumlah Hotel (X_3) dengan penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari, terdapat hubungan yang kuat, yakni sebesar 95,03 %.

Salah satu penunjang kegiatan ekonomi kepariwisataan maupun kegiatan sosial lainnya adalah tersedianya fasilitas pemondokan yaitu hotel dan losmen yang cukup baik.

Pajak Hotel sangat cocok diperkotaan karena masyarakatnya mempunyai mobilitas yang cukup tinggi dan objek pajak jelas tempatnya (Devas,1989).

Sebagai Ibukota Propinsi, Kota Kendari merupakan pusat aktivitas baik pemerintahan dan pembangunan maupun bisnis dan perdagangan sehingga memiliki daya serap yang tinggi dalam pengembangan usaha perhotelan .Selain itu Kota Kendari merupakan daerah tujuan sekaligus kota

transit bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Sulawesi Tenggara yang tentunya merupakan potensi pengembangan terhadap jasa perhotelan di Kota Kendari yang diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak hotel.

Dari hasil analisis regresi menyimpulkan bahwa variabel jumlah hotel mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap tinggi rendahnya penerimaan Pajak Hotel karena dengan berkembangnya objek pajak ini dibarengi dengan perbaikan fasilitas dan pelayanan sehingga semakin banyak masyarakat yang ingin menikmati fasilitas dan jasa hotel dengan demikian meningkatkan pendapatan jasa hotel dan juga meningkatkan penerimaan pajak hotel.

4. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/ wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3), baik secara parsial maupun secara simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) di Kota Kendari.

Implikasi hasil penelitian ini bahwa variabel PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/ wisatawan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3), penting dan dapat dijadikan sebagai indikator atau variabel yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari. Atau dapat juga digunakan sebagai alat perencanaan dalam memprediksi besarnya Penerimaan Pajak Hotel kalau PDRB Sektor Hotel (X_1), Jumlah Pengunjung/

wisatwan (X_2), dan Jumlah Hotel (X_3) di Kota Kendari sudah diketahui. Dengan demikian, Pemerintah dapat mengetahui besarnya potensi Penerimaan Pajak Hotel untuk periode tertentu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ wisatawan, dan Jumlah Hotel, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.
2. Variabel Jumlah Hotel (X3) memiliki elastisitas paling tinggi terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari dibandingkan dengan variabel PDRB Sektor Hotel (X1) dan Jumlah Pengunjung/ Wisatawan (X2). Hal ini terjadi akibat makin baiknya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh hotel.

B. Saran-saran

Sebagai kegiatan lanjutan, maka penulis memberikan saran-saran kepada Pemerintah Kota Kendari antara lain sebagai berikut :

1. PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/wisatawan , dan Jumlah Hotel, penting dan dapat dijadikan indikator yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan penerimaan Pajak hotel di Kota Kendari. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai alat perencanaan dalam memprediksi besarnya

penerimaan Pajak hotel dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui besarnya potensi penerimaan Pajak hotel untuk periode berikutnya.

2. Kepada Pemerintah diupayakan kegiatan promosi potensi-potensi daerah Kota Kendari baik itu mengenai potensi untuk berusaha, kerjasama maupun pengenalan potensi pariwisata yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya, sehingga semakin banyak pengunjung yang datang tentunya penerimaan pajak hotel juga akan meningkat.
3. Optimalisasi dalam pungutan pajak dapat ditingkatkan dengan melakukan kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek pajak hotel dengan melakukan uji petik secara berkala guna mengetahui potensi jumlah penerimaan /omset setiap objek pajak hotel.
4. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penerimaan perlu dilakukan pengawasan langsung secara berkala dalam kegiatan pendataan sampai pemungutan, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak, dan tidak kalah pentingnya adalah sanksi terhadap wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya termasuk bagi wajib pajak yang tidak transparan dalam melaporkan pajak atas usahanya.
5. Untuk meningkatkan peranan pajak hotel terhadap pajak daerah disarankan agar melakukan penelitian tentang sumber-sumber atau objek yang potensial untuk dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2005. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Kendari*, Kendari
- Davey, J, 1998. *Pembiayaan Pemerintah daerah*. UI-Press , Jakarta
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press, Jakarta
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI-Press , Jakarta.
- Gujarati, D. 1988. *Basic Econometrics*. Internasional Student Edition. McGraw-Hill International Book Company : New York.
- Hamid, Fahrul. 2004. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Samarinda*. Makassar ,Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP-AMP-YKMP, Yogyakarta.
- Hendranto, 2002.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan*, Makassar, :Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Kaho, Riwo.1997.*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Garfindo Persada , Jakarta.
- Kota Kendari Dalam Angka*. 2005 , Kendari
- Kunarjo, 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Edisi ke-3. UI-Press , Jakarta
- Lincoln ,Arsyad. 1999. *Ekonomi Daerah*. edisi pertama. BPFE ,Yogyakarta.
- Mangkusubrata, Guritno. 2000. *Ekonomi Publik*. Edisi ke-3. BP-FE, Yogyakarta.

Machfud, S. 2002. **Desentralisasi Fiskal**. Materi Seminar Nasional, Yogyakarta

Mardiasmo, 2002. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Andi , Yogyakarta.

Mugodim, 1999. **Perpajakan**. UI-Press dan Ekonomi , Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK./1 Kendari Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagian Hukum Setda TK. II , Kendari.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pajak Hotel. Bagian Hukum Sekretariat , Kendari

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 dan 66 Tahun 2001. Tentang Peraturan Pelaksana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. CV. Tamita Utama, Jakarta.

Program Pascasarjana Unhas.,2003. **Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi**: Makassar.

Riza, S. G. 1984. **Efisiensi Ekonomi Peternakan sapi Perah Rakyat di Kelurahan Kebun Pedes**, Kodya Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Siahaan, Marihot .P ,2005,**Pajak Daerah & Retribusi Daerah**. Pt. RajaGarfindo persada , Jakarta.

Sugiyono, 2002. **Metode Penelitian Administrasi**. Alfabeta , Bandung.

Suparmoko,M. 2002. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Andi , Yogyakarta.

Supranto, J. 1995. **Ekonometrik**. Buku Dua. lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , Jakarta.

Syamsi, Ibnu. 1983.**Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara**. PT Bina Aksara : Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika , Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinar Grafika , Jakarta

_____. **Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengganti UU No. 18 Tahun 1997.** CV Tamita Utama ,Jakarta

Welch, S. dan Comer, J. 2002. **10 Model Penelitian dan Pengolahan dengan SPSS 10,01.** Yogyakarta: Andi dan Semarang: Wahan Komputer.

Yani, Ahmad. 2002.**Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.** PT Raja Grafindo Persada , Jakarta

Yuwono ,Prpto. 2004. **Pengantar Ekonometri.** Andi , Yogyakarta

gresion

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
	Jumlah Hotel, PDRBSektorHotel, Jumlah PengunjungHotel		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: PajakHotel

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.9988 ^a	0.9977	0.9907	0.0399

- a. Predictors: (Constant), JumlahHotel, PDRBSektorHotel, JumlahPengunjungHotel

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	4.5474	3	1.5158	819.8284	.000
	Residual	0.0111	6	0.0018		
	Total	4.5584	9			

- a. Predictors: (Constant), JumlahHotel, PDRBSektorHotel, JumlahPengunjungHotel
 b. Dependent Variable: PajakHotel

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients

Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.0763	1.0808		0.
	PDRBSektorHotel	0.4621	0.1751	0.1247	2.
	JumlahPengunjungHotel	0.905	0.1154	0.3965	7.
	JumlahHotel	1.4093	0.1884	0.5091	7.

Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics		
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1						
	PDRBSektorHotel	0.9092	0.7329	0.0532	0.1818	5.5009
	JumlahPengunjungHotel	0.9651	0.9545	0.158	0.1588	6.2975
	JumlahHotel	0.9853	0.9503	0.1506	0.2099	4.7844

a. Dependent Variable: PajakHotel

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	condition index
1	1	3.998	1.000
	2	0.002	43.004
	3	0.000	168.736
	4	0.000	258.77

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions			
		(Constant)	PDRBSektor Hotel	Jumlah pengunjung Hotel	JumlahHotel
1	1	0	0	0	0
	2	0.03	0	0	0.1
	3	0	0.53	0.4	0
	4	0.97	0.47	0.6	0.9

a. Dependent Variable: PajakHotel

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Predicted Value	16.810778	19.074961	17.99064	0.7108173
Residual	-0.0762838	0.0491398	0	0.0351084
Std. Predicted Value	-1.66	1.525	0	1
Std. Residual	-1.774	1.143	0	0.816

a. Dependent Variable: Pajak Hotel

Regresion

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah Hotel, PDRBSektorHotel, Jumlah Pengunjung Hotel		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: PajakHotel

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.9988 ^a	0.9977	0.9907	0.0399

- a. Predictors: (Constant), JumlahHotel, PDRBSektorHotel, JumlahPengunjungHotel

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.6868	3	0.2289	143.5506	.0613 ^a
	Residual	0.0016	1	0.0016		
	Total	.6884	4			

- a. Predictors: (Constant), JumlahHotel, PDRBSektorHotel, JumlahPengunjungHotel
 b. Dependent Variable: PajakHotel

Regresion

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah Hotel, PDRBSektorHotel, Jumlah Pengunjung Hotel		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: PajakHotel

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.9988 ^a	0.9977	0.9907	0.0399

- a. Predictors: (Constant), JumlahHotel, PDRBSektorHotel, JumlahPengunjungHotel

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.6868	3	0.2289	143.5506	.0613 ^a
	Residual	0.0016	1	0.0016		
	Total	.6884	4			

- a. Predictors: (Constant), JumlahHotel, PDRBSektorHotel, JumlahPengunjungHotel
 b. Dependent Variable: PajakHotel